

ANALISIS FINANSIAL DALAM RANGKA PENERAPAN MULTISISTEM SILVIKULTUR PADA AREAL HUTAN PRODUKSI DI INDONESIA

Oleh:

Odang Kariana

Direktur Utama PT. ITCI Kartika Utama (ITCI-KU)

PENDAHULUAN

Rancang bangun sistem pengelolaan hutan alam tropis di Indonesia ditujukan untuk meningkatkan investasi dan pendapatan negara dalam kerangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan peran sosial budaya. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dilakukan baik oleh perusahaan BUMN maupun BUMS dalam bentuk perusahaan pemegang IUPHHK (dulu bernama Hak Pengusahaan Hutan atau HPH). Aktualisasi pengelolaan hutan berbasis IUPHHK selama lebih dari tiga dekade menggunakan sistem tunggal dan seragam, yakni sistem silvikultur TPTI.

Meskipun selama kurun waktu lebih dari tiga dekade telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional, namun di sisi lain pengelolaan hutan pada berbagai tapak yang berbeda dengan sistem yang bersifat seragam telah mengakibatkan kian menurunnya produktivitas hutan. Kenyataan bahwa luas dan produksi maupun jumlah unit usaha menurun menunjukkan bahwa di masa yang akan datang kondisi hutan pasca penerapan sistem silvikultur konvensional belum atau bahkan tidak mungkin lagi dikelola secara menguntungkan (baca : lestari). Meskipun harus diakui bahwa berbagai realitas penurunan produktivitas maupun jumlah IUPHHK bukan semata-mata karena persoalan penurunan kuantitas dan kualitas hutan, melainkan juga dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi 1997 dan gerakan reformasi 1998 yang ditandai oleh penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Resultante kedua faktor tersebut telah menghasilkan perubahan sistem politik, sosial dan ekonomi nasional yang berdampak terhadap sektor kehutanan. Kondisi tersebut kian diperkuat dengan masuknya era kesejagatan yang secara cepat mengubah kondisi geopolitik ke geoekonomi yang terintegrasi dan saling bergantung satu sama lain.

Pertanyaannya kini, dengan berbagai perubahan lingkungan strategis di tingkat lokal, regional dan internasional, serta kondisi faktual hutan alam produksi Indonesia, diperlukan upaya adaptasi setiap perusahaan pemegang IUPHHK baik dari sisi produktivitas pasokan sumber bahan baku dan kesesuaian permintaan pasar agar tetap dapat bertahan dan bahkan mampu memenangi persaingan di tingkat global.

KONFIGURASI HUTAN ALAM PRODUKSI INDONESIA

Sesuai Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1983, luas kawasan hutan alam produksi mencapai 64.3 juta hektar. Selanjutnya, sesuai dengan status dan fungsinya, kawasan hutan alam produksi tersebut dikelola oleh perusahaan pemegang HPH dengan menggunakan sistem silvikultur TPTI. Sebagai informasi, pada tahun 1997, umlah HPH di Indonesia mencapai 450 unit dengan luas areal konsesi mencapai 52.813.041 hektar.¹

Berdasarkan pencermatan Boen M. Purnama & Hadi Daryanto tahun 2006 hutan alam produksi telah mengalami penurunan kuantitas maupun kualitasnya. Dari kawasan hutan produksi seluas 57,7 juta hektar yang kondisinya relatif baik adalah 28,27 juta hektar dan dalam status masih dibebani hak IUPHHK, sementara 12,98 juta hektar dalam status tidak dibebani hak pengelolaan serta bersifat *open access*. Lebih jauh lagi, dari luas hutan produksi 57,7 juta hektar, 16,45 juta hektar di antaranya berada dalam kondisi rusak oleh karena berbagai sebab, baik dikawasan hutan yang dibebani hak maupun yang bersifat *open access*. Kerusakan hutan tersebut antara lain diakibatkan karena berbagai sebab, antara lain karena praktek perambahan, konversi, bencana kebakaran hutan maupun faktor-faktor lain.

Kondisi konfigurasi kawasan hutan produksi yang telah rusak dan yang masih baik tersebut di atas tentu saja membutuhkan sistem pengelolaan yang relatif berbeda dengan sistem terdahulu yang bersifat tunggal dan seragam sehingga akan memberikan tingkat produktivitas yang lebih tinggi dan karenanya akan memberikan kelayakan usaha secara ekonomi. Dengan kata lain, dalam suatu kawasan hutan produksi yang memiliki konfigurasi kawasan yang berbeda – beda perlu dilakukan penyesuaian sistem kelola hutan (baca : sistem silvikultur). Dengan asumsi bahwa tingkat kerusakan di hutan produksi bervariasi, serta karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungan ekologi, sosial, ekonomi dan bisnisnya juga beragam, maka dalam hal ini memberikan peluang bagi penerapan multisistem silvikultur.

PROSPEK PENERAPAN MULTISISTEM SILVIKULTUR

Perspektif finansial dalam penerapan multisistem silvikultur menjadi perhatian masyarakat pelaku bisnis kehutanan, setidaknya karena dua alasan. Pertama, karena melihat adanya peluang investasi, dan yang kedua, karena ada masalah atau tantangan yang akan dihadapi. Multisistem silvikultur merupakan satu atau beberapa produk teknologi pembinaan hutan yang memungkinkan peningkatan produktivitas hutan, perbaikan kualitas kayu dan luas pengusahaan yang lebih kecil. Legalitas penerapan multisistem silvikultur di suatu kawasan hutan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, khususnya Paragraf 4 Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam

¹ Anonimous. 1997. *Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan*. Badan Pusat Statistik. Jakarta. Indonesia.

Hutan Alam Pada Hutan Produksi; Pasal 34, ayat (2) Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya. Dengan demikian pengertian "multi sistem silvikultur" dipahami sama dengan "satu atau lebih sistem silvikultur sesuai dengan karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya". Mestinya hal ini juga disesuaikan dengan karakteristik sosial dan ekonomi-bisnis sektor kehutanan, termasuk di dalamnya subsektor industri hasil hutan yang akan memasok produknya ke pasar.

PP No. 6 tahun 2007 yang akan memfasilitasi IUPHHK untuk dapat menerapkan multisistem silvikultur sudah tentu dibuat dengan maksud membuka peluang investasi bagi pengusaha dan peluang kreasi pilihan (lebih dari satu) teknologi pengelolaan hutan, sebagai respon atas semakin terbukanya peluang pasar oleh adanya permintaan pelbagai macam produk dari kayu seperti kayu lapis, kayu konstruksi, kayu olahan lainnya, rayon, bubur kayu dan kertas, serta kayu energi. Pilihan teknologi haruslah memiliki daya tawar yang tinggi untuk meningkatkan produktivitas hutan karena riap pertumbuhan hutan yang bertambah, memenuhi kelayakan pasar dan kelayakan finansial. Pada saat ini di Indonesia setidaknya sudah ada 5 model sistem silvikultur hutan yaitu (1) sistem silvikultur model TPTI konvensional, (2) TPTI-Intensif (SILIN), (3) THPB, (4) PMUMHM dan (5) Kelas perusahaan Meranti di Perum Perhutani.

Paradigma yang mendasari makalah ini adalah bahwa sistem kelola hutan dibagi dalam tiga industri: industri primer untuk menghasilkan bahan baku industri hasil hutan, industri sekunder memroses bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi, dan industri tersier melayani konsumen, industri primer dan industri sekunder. Dalam paradigma ini, pilihan sistem silvikultur yang diterapkan adalah untuk menjamin kelestarian produksi, ekonomi, lingkungan dan sosial dan akan tunduk pada dominasi tuntutan pasar. Pasar atau konsumenlah yang menentukan nilai kayu. Dengan demikian sejak awal, pengelola hutan harus dapat mengidentifikasi industri dan konsumen yang akan dilayani oleh sektor kehutanan. Dengan paradigma ini silvikultur adalah sebuah usaha komersial karena hasil akhir tindakan-tindakan silvikultur adalah menjual kayu untuk memperoleh pendapatan². Paradigma ini didasari fakta bahwa akhir-akhir ini sektor kehutanan dituntut untuk memenuhi permintaan konsumen dan masyarakat, sehingga tuntutan itu juga berdampak pada praktek kelola hutan di lapangan yang menjadi domain silvikultur³.

² *The Language of Silviculture*. California Stewardship Program.
<http://ceres.ca.gov/foreststeward/html/langsilv.html>. Downloaded August 7, 2008

³ John Innes. May-2008. *Recent Developments in Silviculture*. Canadian Silviculture.
<http://www.canadiansilviculture.com/spring05/recent.html>. Downloaded August 7, 2008.

Tabel 1. Potret Perbandingan Sistem Silvikultur

SISTEM SILVIKULTUR	JENIS	PARAMETER
TPTI di hutan primer	Dipterokarpa	Produksi : 40 m ³ /ha Riap : 1,1 m ³ /ha/th IRR : 162 %
TPTJ di hutan sekunder/bekas tebangan	Dipterokarpa	Produksi : na Riap : na IRR : 14 %
THPB di hutan tidak produktif	<i>Acacia mangium</i>	Produksi : 150 m ³ /ha Riap : 15 – 20m ³ /ha IRR : 25 %
TPTI-Intensif (SILIN) di hutan sekunder/bekas tebangan	Dipterokarpa	Produksi : 400 m ³ /ha Riap : 10 m ³ /ha/th IRR : na

Sumber : berbagai sumber yang diolah, Keterangan : na = *non available*

Secara finansial masalah yang dihadapi oleh para pelaku bisnis dalam konteks silvikultur komersial adalah seberapa mampu investasi pada pembangunan hutan dengan sistem silvikultur yang dipilih dapat memberikan *return* yang menarik dan menguntungkan. Sementara seperti diketahui, kemampuan untuk investasi dalam rangka penerapan multisistem silvikultur yang kesemuanya harus dilakukan secara intensif dewasa ini sangat rendah kalau tidak ingin dikatakan tidak ada lagi. Bagaimanapun masalah pemilihan sistem silvikultur merupakan bagian penting dari penganggaran modal suatu perusahaan yang melibatkan dimensi nilai waktu dari seluruh biaya mulai dari awal investasi pembangunan hutan hingga perusahaan berakhir. Selain itu, hal ini juga terkait dengan parameter kelayakan finansialnya. Analisis kelayakan finansial umumnya menyangkut biaya mulai dari awal investasi sampai perusahaan berakhir, kemudian nilai penerimaan/pendapatan, nilai laba/rugi dan arus kas yang akan diperoleh, dan terakhir menghitung nilai parameter kelayakan proyek diantaranya NPV, IRR, BCR. Beberapa angka indikatif yang bersifat finansial telah banyak dikemukakan para ahli dan di sini dicoba dikompilasi dari pelbagai sumber untuk memberikan gambaran dukungan prospek penerapan multisistem silvikultur berdasarkan pengalaman penerapan beberapa model sistem silvikultur.

DAYA SAING DAN ADAPTASI

Perusahaan IUPHHK sebagaimana pelaku bisnis yang lain, disebut mempunyai "daya saing" apabila menguntungkan dan mampu membayar gaji karyawan, memenuhi kewajiban kepada negara, mempunyai *return* yang layak kepada pemegang saham serta berkembang secara wajar dengan tetap mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan peran sosial budaya. Seperti telah dipahami "daya saing" negara tidak otomatis menjadi daya saing perusahaan karena di samping ada kesulitan membuat yang kompleks menjadi simpel juga proses transformasinya panjang dan berliku melalui mekanisme birokrasi yang seringkali biaya transaksinya relatif tinggi. Pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan mempunyai perangkat teknis B2PD (Balai Besar Penelitian Dipterokarpa) dan telah mengembangkan 8 jenis kayu dari kelompok

Dipterokarpa (meranti) sebagai prioritas karena nilai komersialnya yang tinggi, riap pertumbuhan yang relatif cepat, dan pengetahuan silvikulturnya yang telah dikuasai.

Di samping nilai komersialnya yang tinggi, dipterokarpa banyak diminati industri karena kecenderungan homogenitasnya memudahkan operasi penebangan dan pengangkutan, serta produksi per hektarnya yang tinggi. Akan tetapi hal itu hanya merupakan keunggulan komparatif jenis belaka. Dihadapkan pada keragaman karakteristik sumber daya hutan dan lingkungan, keunggulan tersebut menjadi kurang banyak berarti. Selanjutnya bila dikontraskan dengan komponen biaya terbesar dari kegiatan pembangunan hutan seperti biaya penyiapan lahan, pemeliharaan dan sarana serta prasarana sebagai efek dari karakteristik sumber daya hutan dan lingkungan, maka kondisi tersebut selayaknya perlu memperoleh penyesuaian. Oleh karenanya dalam investasi pembangunan hutan ke depan konsep keunggulan komparatif jenis harus terus direvitalisasi dan dikembangkan ke arah pembentukan keunggulan kompetitif yang berbasis penggunaan bibit unggul, di samping manajemen lahan dan manajemen tegakan (pemeliharaan dan pengendalian hama, penyakit serta gulma).

Sebagai contoh kasus daya saing, pada Tabel 2 disajikan bentuk adaptasi dengan ragam karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya, berupa 3 model sistem silvikultur yang sedang dirancang dan akan dikembangkan di PT.ITCI-KU.

Model TPTI-Intensif dipilih untuk mengelola hutan sekunder/bekas tebangan (*Logged Over Area*). Model PMUMHM merupakan uji coba Departemen Kehutanan yang diterapkan juga di hutan sekunder dan THPB untuk merehabilitasi hutan tidak produktif akibat kebakaran berat.

Tabel 2. Sistem Silvikultur di PT. ITCI-KU

Sistem Silvikultur	Kondisi Hutan	Jenis Tanaman	Pasar Industri
TPTI-Intensif (SILIN)	Hutan sekunder	Dipterokarpa 8 jenis	Kayu lapis & konstruksi
PMUMHM	Hutan sekunder	Dipterokarpa 5 jenis	Konstruksi
THPB	Hutan pasca kebakaran berat	<i>Accasia mangium</i> , <i>Gmelina arborea</i> & <i>Eucalyptus sp</i>	Produk bubuk kayu & MDF

Sumber : Usulan Rencana kerja PT.ITCI-KU 2008

Untuk model TPTI-Intensif sumber keunggulan kompetitif dapat diharapkan dari penggunaan jenis unggul melalui pemuliaan (*improvement*) jenis, manipulasi lingkungan dan pengendalian hama, penyakit dan gulma secara terpadu. Model THPB dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi hutan yang telah mengalami kerusakan sehingga kegiatan penanaman menjadi aktivitas yang dominan sejak

awal. Kelola hutan berbasis THPB dimulai dari hutan tidak produktif atau lahan kosong, tanah terbuka, semak belukar dan perdu. Seperti telah menjadi pembicaraan antar pengusaha, pembangunan hutan dengan model TPTI-Intensif dengan tiga pilar kegiatan membutuhkan biaya yang relatif besar. Kegiatan pemuliaan jenis dapat dikatakan mahal, demikian juga kegiatan manipulasi lingkungan dan kegiatan pengendalian hama dan penyakit terpadu juga mahal.

Berdasarkan pendapat tentang pembiayaan penerapan sistem TPTI-Intensif yang mahal maka perusahaan IUPHHK sebagai pelaksana kebijakan sistem TPTI-Intensif perlu didukung oleh hasil-hasil kajian dari badan litbanghut yang terkait dengan pembiayaan, peningkatan kapasitas adaptasi terhadap pilar pertama, kedua dan ke tiga dari TPTI-Intensif. Nilai penting dari kajian soal pembiayaan dan adaptasi terutama agar pemahaman tentang "mahal" tidak terhenti pada terminologi kualitatif. Sebagai ilustrasi adalah upaya untuk dapat menekan biaya adaptasi teknik SILIN khususnya dalam kegiatan pemuliaan jenis. Sebagaimana diketahui pengalaman di lapangan telah mampu melakukan pemuliaan jenis pada taraf awal secara fenotif dengan cara seleksi jenis unggul dari bibit cabutan (*wildling*) yang terbukti dapat tumbuh bagus, dan hal ini perlu diangkat dan diapresiasi. Seperti diketahui pemuliaan jenis secara genotip memerlukan beberapa tahap pengujian seperti uji jenis, uji progeny dan uji lainnya yang memerlukan biaya, waktu dan keahlian khusus yang tidak selalu dapat dimiliki oleh kebanyakan perusahaan IUPHHK.

Dengan mendasarkan diri pada kenyataan bisnis kehutanan maka pertimbangan pasar terhadap permintaan jenis kayu tertentu perlu juga diperhatikan. Apabila hal itu menjadi acuan dan PP No.6 tahun 2007 menjadi basis kajian maka, wajar jika para pengusaha IUPHHK mengharapkan bahwa pengambil kebijakan tentang sistem silvikultur bersikap lebih arif dalam mempertimbangkan setiap usulan sistem silvikultur yang telah dianggap sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungan.

PROYEKSI PENERAPAN MULTISISTEM SILVIKULTUR

Dalam konteks bisnis, biaya timbul dalam proses untuk memperoleh pendapatan yang diterima sebagai hasil penjualan. Biaya perusahaan hutan dengan model sistem silvikultur THPB dan TPTI-Intensif (SILIN), sebagaimana pengelompokan biaya, terdiri dari biaya Investasi dan biaya operasional. Biaya investasi meliputi pengeluaran maupun pengadaan barang yang manfaatnya dapat dinikmati selama jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti : biaya perencanaan sebelum produksi (iuran IUPHHK, citra landsat, studi evaluasi lingkungan dsb.), penataan batas, pembangunan jalan utama/cabang, dan pengadaan bangunan. Biaya yang dikeluarkan dikapitalisir sebagai aktiva dan disusutkan (depresiasi/amortisasi) selama masa manfaatnya. Adapun biaya operasional merupakan biaya yang terjadi secara rutin dalam kegiatan operasi sehari-hari baik operasi perusahaan hutan, operasi penunjang, kegiatan penjualan, manajemen maupun administratif lainnya yang manfaatnya kurang dari satu tahun atau nilainya relatif tidak materiil dibanding seluruh biaya yang ada. Biaya operasional dikelompokkan berdasar keterkaitan aktivitasnya dengan operasi perusahaan hutan tanaman,

yaitu: Biaya Pengusahaan Hutan (Harga Pokok Produksi), Biaya Penjualan serta Beban Usaha dan Bunga Pinjaman. Biaya-biaya operasional dapat dikelompokkan lagi di antaranya biaya : perencanaan, penanaman, pemeliharaan dan pembinaan hutan, pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan, pemungutan hasil hutan, pemenuhan kewajiban, sarana dan prasarana.

Dengan beberapa asumsi yang mendasari perhitungan, antara lain pendanaan pembangunan hutan tidak menyertakan dana pinjaman dari pemerintah (dalam bentuk DR) tetapi menggunakan sumber dana yang diupayakan dari modal sendiri 35% dan pinjaman bank 65%, bunga deposito 8% dan suku bunga pinjaman bank komersial 14% dengan tingkat *discount rate* 16%. Hasil proyeksi finansial pengembangan multisistem silvikultur di PT.ITCI-KU dalam ribuan adalah sebagai berikut :

1. Total biaya investasi dan biaya modal kerja untuk daur I (8 th) dan 24 Tahun pengusahaan hutan untuk daur I (8 tahun) dan daur II (24 tahun) sebesar Rp 1.014.854.812 dan simulasi dicapai besaran Rp 6.788.551.477. Dengan investasi awal Rp 406.856.065.
2. Laba (rugi) pengusahaan hutan sebelum pajak sebesar Rp 7.921.815.958 menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari investasi yang ditanam.
3. Arus kas mencatat surplus arus kas sebesar Rp 5.796.479.030 menunjukkan strategi pengaturan finansial pada tingkat keuntungan atas investasi.
4. Rekapitulasi neraca periode tahun 2011s/d 2034 pada sisi total aktiva terus meningkat : Rp 4.750.000 (tahun 0); Rp.83.407.395 (tahun 2011); Rp 5.404.913.460 (tahun 2033); Rp 5.812.220.961 (tahun 2034).
5. IRR sebesar 17,86% artinya kegiatan pengusahaan layak diusahakan pada tingkat *rate requirement* sebesar 16%.
6. NPV bernilai positif sebesar Rp. 93,802 milyar yang berarti jika proyek pengusahaan hutan tersebut dijalankan, maka dalam jangka 24 tahun akan mendapatkan keuntungan dengan nilai kini sebesar Rp. 93,802 milyar.
7. B/C Ratio menunjukkan 1,06 yang berarti total pendapatan yang akan diterima akan surplus sebesar 10,6% dari total biaya/pengeluaran yang dibelanjakan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Silvikultur pada dasarnya adalah sebuah usaha komersial karena hasil akhir tindakan-tindakan silvikultur adalah menjual kayu untuk memperoleh pendapatan. Kelola hutan secara intensif dapat dilakukan sesuai dengan konfigurasi kawasan sebagaimana tercermin dari kondisi tapak sehingga menghasilkan pertumbuhan dan kualitas kayu yang bagus serta kondisi ekonomi dan finansial yang mampu mendorong dilakukannya kelola intensif.

Kebijakan sistem kelola hutan produksi yang didukung oleh legislasi multisistem silvikultur merupakan peluang investasi bagi pengusaha dan sekaligus peluang kreativitas dan inovasi teknologi pembinaan hutan sebagai respon atas semakin terbukanya peluang pasar akibat permintaan pelbagai macam produk dari kayu. Secara teknis hal itu harus didukung dengan mekanisme pemuliaan pohon melalui penggunaan bibit unggul, manipulasi lingkungan dan pengendalian hama/penyakit secara terpadu dalam rangka tercapainya keunggulan kompetitif. Karena itu, Para pengambil kebijakan tentang sistem silvikultur diharapkan lebih arif dalam mempertimbangkan setiap usulan sistem silvikultur oleh Pemegang IUPHHK yang telah dianggap sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungan.

Berdasarkan analisis finansial, sistim THPB dan sistem TPTI-Intensif yang dijadikan satu kesatuan, memberikan keuntungan finansial absolut yang layak, yang lebih tinggi dibanding dengan penerapan sistem TPTJ tetapi, masih lebih rendah dari THPB *Acacia mangium*. Meski keuntungan finansial absolut cukup baik akan tetapi masih kurang menarik bagi investasi karena BC-Rasio hanya sedikit lebih tinggi dari satu. Maka perlu dipikirkan cara untuk meningkatkan daya tarik investor dengan memberikan insentif biaya, deregulasi kebijakan, rasionalisasi pungutan, kebebasan memilih jenis dan daur, serta jaminan kepastian hukum dan keamanan berusaha.

Sebagai catatan penutup sekaligus sebagai refleksi, dengan kondisi kian menurunnya produktivitas hutan produksi, ancaman terhadap upaya konversi dari status kawasan budi daya kehutanan (KBK) menjadi kawasan budi daya non kehutanan (KBNK) melalui perubahan tata ruang oleh Pemerintah Daerah serta upaya konversi dari usaha kehutanan menjadi usaha perkebunan, pertambangan atau pengembangan sektor lain diluar kehutanan yang dirasa jauh lebih menguntungkan menjadi sebuah ancaman nyata yang kini terus menanti para pengusaha hutan. Karenanya, upaya penerapan multisistem silvikultur yang telah diberi landasan payung hukum merupakan sebuah solusi konkrit dari persoalan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2007. Dipterokarpa, masa depan hutan tanaman Indonesia. Laporan Utama Majalah Kehutanan Indonesia Edisi IX tahun 2007.
- _____. 2008. Penggunaan DR sebagai sumber dana pembiayaan reboisasi dengan teknologi SILIN di areal HPH (IUPHHK).
- _____. 2006. Dipterocarps plantation forest development : The need for policy instrument. UGM – ITTO project PD 41/00 Rev.3 (F,M).
- _____. 2007. Modul Pembekalan umum SILIN. Tim Mafes Silvikultur Fahutan UGM.

PROSPEK PEMANFAATAN HASIL HUTAN DARI AREAL HUTAN PRODUKSI DI INDONESIA

Oleh:

**Maman Mansyur Idris, Agustinus P. Tampubolon,
Jamaludin Malik dan Ratih Damayanti**

Pusat Penelitian Hasil Hutan (P3HH), Departemen Kehutanan RI

ABSTRAK

Multisistem silvikultur difahami sebagai penerapan lebih dari satu sistem silvikultur pada suatu Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) atau areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya. Penerapan multisistem silvikultur ini juga dilatari berbagai tuntutan terhadap sumber daya hutan tersebut.

Pemanfaatan hasil hutan dari multisistem silvikultur sangat prospektif karena tingginya kebutuhan kayu baik di tingkat nasional maupun global. Penerapan multisistem silvikultur memungkinkan suatu unit pengelolaan hutan produksi dapat menghasilkan beragam produk, baik hasil hutan kayu maupun bukan kayu dengan kualitas yang beragam pula. Hasil yang bervariasi baik jenis maupun karakteristiknya dari multisistem silvikultur memberikan prospek pemanfaatan produk hasil hutan dan turunannya semakin bervariasi sesuai kebutuhan.

Kata kunci : Multisistem silvikultur, prospek pemanfaatan, hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki kekayaan alam berupa hutan tropika yang cukup luas terdiri dari beberapa tipe hutan/vegetasi dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Peran hutan dalam pembangunan memberikan manfaat yang cukup besar dan senantiasa mengacu pada azas pemanfaatan yang optimal dan lestari (Alrasyid, 2000). Dalam konteks inilah berbagai sistem silvikultur telah diterapkan dalam pengelolaan hutan di Indonesia untuk memenuhi tuntutan terhadap hutan. Disamping untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan, hutan juga harus dapat memberikan kesejahteraan dari hasil hutan yang diperoleh.

Penerapan suatu sistem silvikultur akan berimplikasi kepada hasil hutan yang diproduksi. Di antara sistem silvikultur yang ada, yang paling banyak diterapkan adalah sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Idealnya sistem tersebut dapat memberikan hasil hutan dari areal hutan alam produksi secara lestari dengan pemanfaatan jenis-jenis kayu komersial dengan batas diameter tertentu. Namun dalam perkembangannya, pada suatu areal hutan produksi ada kemungkinan diterapkannya multisistem silvikultur agar dapat memberikan asas